

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Maria Ririn Indriani

mariaririnindriani@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of implementation of financial management principles, local financial accountancy system, and human resources competence on local-government financial statements at Surabaya regional or local government agency. While, the was quantitative with 25 as sample. Moreover, the sample collection technique used purposive sampling. This research instrument used survey; as the data used primary in the from of quetionnaires which were given to the respondent. While, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. This research result concluded the implementation of financial management principles had positif effect on the quality of local-government financial statements. It meant, there should be an effective of financial management principles in order to have a qualified local-government financial statements. Moreover, the implementation of local financial accountancy system had positive effect on the quality of local-government financial statements. In order words, the better the government implemented procedures of local financial accountancy system did, the higher the quality of local-government financial statements was. In addition, the human research competence had positive effect on the quality of local-government financial statements. It meant, there should be a competent human resources in order to have a qualified local-government financial statements.

Keywords: local government financial management, local government agency, human resources competence, quality of local-government financial statements.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan prinsip pengelolaan keuangan, penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 SKPD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan lapooran keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pemerintah menjalankan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten.

Kata kunci: pengelolaan keuangan daerah, SAKD, Kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik membagi pekerjaan kedalam satuan kerja termasuk didalamnya adalah satuan kerja ditingkat daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah. Fenomena yang terjadi adalah masih terdapat permasalahan pada masing-masing instansi terkait dengan penggunaan anggaran diantaranya perencanaan yang kurang efektif, realisasi anggaran yang belum maksimal, kurangnya transparansi yang mengakibatkan dokumen anggaran masih susah diakses, kurangnya keterlibatan publik dan juga rawan terjadi korupsi.

Melihat masih belum maksimalnya pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan, maka diperlukan upaya untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek *et al.*, (2015) faktor yang diduga berpengaruh pada laporan keuangan adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kompetensi SDM dan pengelolaan keuangan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor tersebut secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan ketiganya secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah salah satu penentu untuk memperbaiki kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan, karenanya semua pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena diperlukan pengelolaan dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan guna menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penyusunan Laporan Keuangan yang berpedoman pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut juga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang juga akan memicu terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kompetensi Sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan SDM yang berkompeten dibidang akuntansi mempermudah pemerintah dalam proses pemahaman sistem akuntansi. Selain itu SDM juga mempunyai peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Penelitian dengan Pembahasan Kualitas Laporan Keuangan Daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti ini bertujuan untuk menguji kembali Penerapan Prinsip Pengelolaan keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya untuk tahu anggaran 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah masalah yang ditetapkan adalah apakah penerapan prinsip pengelola keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Agency theory pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. *Agency theory* didalamnya terdapat hubungan agensi yang muncul ketika satu orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam pemerintahan yang demokrasi terdapat hubungan keagenan antara pemerintah sebagai penyedia informasi keuangan dan masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (agen) mempunyai tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkam segala aktivitas dan

kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo, 2009).

Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas. Tujuan utama dari Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berkualitas yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Agar dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus mempunyai Laporan Keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut antara lain: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat Dibandingkan; (4) Dapat Dipahami.

Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 6 mengatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut Soleh (2010:10) yaitu : (1) Akuntabilitas; (2) *Value For Money*; (3) Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik; (4) Transparansi; (5) Pengendalian.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Dalam Kepemendagri no 29 tahun 2002 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terdiri dari: (1) Pencatatan; (2) Penggolongan dan Pengikhtisaran; (3) Pelaporan. Manfaat sistem akuntansi keuangan daerah yaitu agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah dan Sabeni, 2017).

Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Berhasil tidaknya suatu entitas bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh keterlibatan SDM, tetapi yang terpenting adalah kompetensi SDM yang dimiliki. Indriasari (2017) mengatakan kompetensi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah (Halim, 2017:330). Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 6 mengatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif yang akan berdampak pada kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2011) secara empiris penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H1 :Penerapan Prinsip Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Halim dan Abdullah, 2010). Latifah dan Sabeni (2017), menyatakan ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan hasil penelitian Yulia (2017) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan berkualitas.

H2 : Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatakan mudah dipahami merupakan salah satu indikator kualitasnya LKPD, hal ini berkaitan erat dengan SDM yang menghasilkannya. Penelitian Yulia (2017) menyatakan sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien dan ekonomis, dengan kata lain semakin banyak sumber daya manusia yang tidak berkompentensi maka semakin besar terjadinya kesalahan yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan akan berakibat pada kualitas laporan keuangan yang dilakukan.

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif yang juga bersifat *ex post facto*. Penelelitian kausal komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mencari faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya. ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel berasal dari sumber yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh penulis. Sampel dipilih

berdasarkan kriteria tertentu agar dapat mendukung penelitian ini. Penelitian ini mengambil 25 OPD yang ada di Surabaya. Kriteria sampel yang digunakan antara lain : (1) Pegawai yang berkedudukan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pada masing-masing Dinas pada Pemerintah Kota Surabaya; (2) Pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) pada masing-masing Dinas pada Pemerintah Kota Surabaya; (3) Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran. Teknik pengumpulan data menggunakan koesioner yang akan di antar langsung oleh penulis kepada kepala dinas bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada OPD kota Surabaya.

Variabel dan Definisi Oprasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen merupakan variabel yang memepengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia.

Definisi Operasional Variabel

Sekaran (2006) mengatakan mengoperasionalkan sebuah konsep agar dapat diukur yang dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, aspek ataupun sifat yang ditinjau oleh konsep. Pertanyaan yang terdapat dalam koesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta presepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden akan diberikan 5 point sekala likert yaitu pernyataan sangat setuju(SS), setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (ST), sangat tidak setuju (STT).

Tabel 1
Indikator Variabel

Variabel	Sumber	Indikator
Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	Halim dan Abdullah (2010)	1. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah 2. Pelaksanaan dan penatausahaan 3. Pertanggungjawaban keuangan daerah 4. Pengawasan keuangan daerah
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Kemendagri No. 29 Tahun 2002	1. Pencatatan 2. Pengelolaan dan pengikhtisarian 3. Pelaporan keuangan.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	Sudiartianti (2015)	1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Keterampilan (<i>skill</i>) 3. Sikap (<i>attitude</i>)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk memecahkan masalah ataupun pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kuantitatif dan metode regresi. Data hasil survei sebelumnya akan dilakukan pengujian secara statistik kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dan n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka item-item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2016:53).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reabel atau handal apabila jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronboach Alpha* $>$ 0,70 (Ghozali, 2016:48).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* \leq 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2016:104).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu : (1) Pendekatan grafik dengan melihat sebaran titik-titik mengikuti arahgaris diagonal; (2) Pendekatan *kolmogorovsmirnov* dengan melihat garis probabilitas $>$ 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah mengumpulkan data, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (Ghozali 2016). Dalam penelitian ini model regresi berganda yang digunakan adalah:

$$KLKP = \alpha + \beta_1 PPKD + \beta_2 PSAKD + \beta_3 KSMD + \epsilon$$

Keterangan :

- α : konstanta
- $\beta_{1,2,3}$: beta atau koefisien regresi dari variabel dependen
- KLKP : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- PPKD : Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
- PSAKD : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- KSMD : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- ϵ : kesalahan residual

Koefisien Determinasi Berganda (Uji R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$) jika nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas, tetapi jika nilai R² mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016:95).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5% pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah : (1) jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5% dengan kriteria sebagai berikut: (1) Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak; (2) Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka H₀ ditolak H_a diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pegawai yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) kota Surabaya dan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Peneliti memilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya sebagai objek penelitian karena sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kebutuhan publik, kepentingan masyarakat dan tuntutan-tuntutan itulah yang mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan.

Deskriptif Karakteristik Responden

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya. Jumlah kuesioner yang dikirimkan sebanyak 4, sehingga total kuesioner yang dikirimkan sebanyak 100 kuesioner.

Tabel 2
Pengumpulan Data

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner layak diuji	88	88%
Kuesioner tidak kembali	5	5%
Kuesioner cacat/ rusak	7	7%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Uji Validitas

Berikut adalah hasil pengujian masing-masing variabel yang disajikan pada tabel:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah	PPKD 1	0,668	0,207	Valid
	PPKD 2	0,675	0,207	Valid
	PPKD 3	0,224	0,207	Valid
	PPKD 4	0,382	0,207	Valid
	PPKD 5	0,289	0,207	Valid
	PPKD 6	0,280	0,207	Valid
	PPKD 7	0,274	0,207	Valid
	PPKD 8	0,315	0,207	Valid
	PPKD 9	0,628	0,207	Valid
	PPKD 10	0,675	0,207	Valid
	PPKD 11	0,263	0,207	Valid
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah	PSAK 1	0,381	0,207	Valid
	PSAK 2	0,435	0,207	Valid
	PSAK 3	0,622	0,207	Valid
	PSAK 4	0,681	0,207	Valid
	PSAK 5	0,443	0,207	Valid
	PSAK 6	0,431	0,207	Valid
	PSAK 7	0,230	0,207	Valid
	PSAK 8	0,654	0,207	Valid
	PSAK 9	0,376	0,207	Valid
	PSAK 10	0,394	0,207	Valid
	PSAK 11	0,305	0,207	Valid
Kompetensi sumber daya manusia	KSDM 1	0,452	0,207	Valid
	KSDM 2	0,393	0,207	Valid
	KSDM 3	0,342	0,207	Valid
	KSDM 4	0,254	0,207	Valid
	KSDM 5	0,328	0,207	Valid
	KSDM 6	0,734	0,207	Valid
	KSDM 7	0,776	0,207	Valid
	KSDM 8	0,461	0,207	Valid
	KSDM 9	0,355	0,207	Valid
	KSDM 10	0,241	0,207	Valid
	KSDM 11	0,762	0,207	Valid
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	KLKPD 1	0,300	0,207	Valid
	KLKPD 2	0,232	0,207	Valid
	KLKPD 3	0,696	0,207	Valid
	KLKPD 4	0,740	0,207	Valid
	KLKPD 5	0,503	0,207	Valid
	KLKPD 6	0,270	0,207	Valid
	KLKPD 7	0,357	0,207	Valid
	KLKPD 8	0,717	0,207	Valid
	KLKPD 9	0,361	0,207	Valid
	KLKPD 10	0,696	0,207	Valid
	KLKPD 11	0,278	0,207	Valid
	KLKPD 12	0,218	0,207	Valid
	KLKPD 13	0,361	0,207	Valid
	KLKPD 14	0,341	0,207	Valid
	KLKPD 15	0,522	0,207	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa semua butir pertanyaan yang mengukur variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,

kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Valid dengan nilai semua r hitung disetiap variabel tersebut lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Koefisien alpha	Keterangan
Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah	0,739	0,70	Reliabel
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah	0,722	0,70	Reliabel
Kompetensi sumber daya manusia	0,764	0,70	Reliabel
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,714	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel sudah reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel > 0,70, sehingga dapat dikatakan reliabel yang artinya jawaban responden dalam penelitian ini stabil.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolinearitas

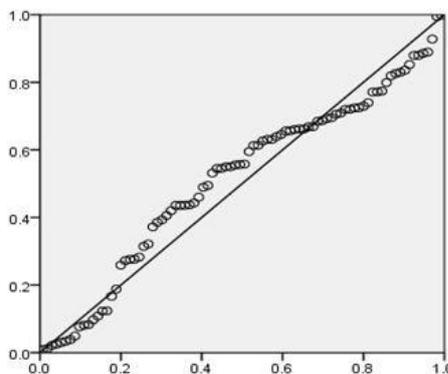
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
PPKD	0,411	2,435
SAKD	0,198	5,039
KSDM	0,193	5,176

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai VIP dari seluruh variabel menunjukan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahawa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas dengan analisis grafik:



Sumber: Data Primer diolah, 2019

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1, terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Maka uji normalitas selanjutnya diuji dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, dengan hasil yang nampak pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79801019
Most Extreme Differences Absolute		.114
	Positive	.075
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.205

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 6, maka dapat disimpulkan data yang diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,205 > 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda, yang nampak pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.871	3.071		.935	.353
	PPKD	.264	.101	.175	2.626	.010
	SAKD	.414	.127	.314	3.269	.002
	KSDM	.617	.123	.487	5.004	.000

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 7, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
 $KLKPD = 2,871 + 0,264 PPKD + 0,414 SAKD + 0,617 KSDM + e$

Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien yang bertanda positif yang berarti ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari uji koefisien determinasi berganda, yang nampak pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.846	.841	1.82984

a. Predictors: (Constant), KSDM, PPKD, SAKD

b. Dependent Variable: KLKP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 8, menunjukkan nilai R² sebesar 0,841 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 84,1% dan sisanya adalah sebesar 15,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Nilai R² mendekati angka 1 menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil dari uji kelayakan model, yang nampak pada Tabel 9.

Tabel 9
Uji Kelayakan Model

ANOVA^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1550.641	3	516.880	154.371	.000 ^a
	Residual	281.257	84	3.348		
	Total	1831.898	87			

a. Predictors: (Constant), KSDM, PPKD, SAKD

b. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 9, dapat dilihat nilai tingkat signifikan uji kelayakan model sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,005= (0,000 < 0,005) maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil dari uji t, yang nampak pada Tabel 10

Dari hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian berikut adalah pembahasannya:

H₁: Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,010 < 0,05 dan hipotesis pertama (H₁) diterima.

- H₂: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini juga dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H₂) diterima.
- H₃: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang juga dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis (H₃) diterima.

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.871	3.071		.935	.353
	PPKD	.264	.101	.175	2.626	.010
	SAKD	.414	.127	.314	3.269	.002
	KSDM	.617	.123	.487	5.004	.000

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pembahasan

Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian pertama dalam hipotesis ini adalah untuk menguji apakah penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 10 menunjukan bahwa nilai B *undestandardized* sebesar 0.264 dengan signifikan sebesar 0.010 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis pertama berhasil menolak H₀. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti dengan tingkat penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang diantaranya akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek *et al.*, (2015) yang menyatakan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Secara umum, menunjukan bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah diterapkan secara efektif pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya aplikasi *e-government* oleh Pemerintah Kota Surabaya yang didalamnya terdapat *e-budgeting* yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas dan pengawasan kinerja pengawas dengan menekan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan terutama potensi korupsi.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah penerapan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui nilai B *undestandardized* sebesar 0.414 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.002 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis kedua berhasil menolak H₀. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2017) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh teori dari Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun dan dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Secara keseluruhan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Surabaya telah dilakukan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk penerapan prosedur sistem akuntansi dipemerintahan kota Surabaya. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah Kota Surabaya juga mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan sebagai pedoman sistem akuntansi bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui nilai *B undestandardized* sebesar 0.617 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis kedua berhasil menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Depok. Penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Latifah dan Sabeni (2017) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Jadi dengan adanya kemampuan sumber daya manusia yang memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin berkompeten sumber daya manusia maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Surabaya sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya aplikasi yang digunakan untuk mengontrol proses kinerja pegawai yang disebut e-SDM yang didalamnya terdapat tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi hingga pensiun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil koesioner yang dibagikan kepada satuan kerja perangkat daerah kota Surabaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya, dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan maka akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya, dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau meningkatnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan menyebabkan

meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya, dapat diartikan bahwa semakin berkompeten sumberdaya manusia maka akan mengkasikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan antara lain: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan ruang lingkup provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan, kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generalisasi untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan daerah menjadi kuat; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar mendampingi responden saat menjawab kuesioner dan melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden tersebut; (3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah misalnya penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. dan S. Abdullah. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan Dipemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(4): 21-41.
- Halim, A. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamdani, S. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan pemerintah Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Ihsanti, H. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD kab. Lima Puluh Kota). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Indriasari, D. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Lilir). *Symposium Nasional Akuntansi XI*. 23-23 Juli 2018. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*.
- Latifah, L. dan A. Sabeni. 2017. Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kab/kota Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta). *Simposium Nattional Akuntansi X*. 26-28 Juli 2007. Uiversitas Hassanudin. Makasar.
- Luh Kadek, S. M., E. S. Ni Luh Gede, dan E. Sujana. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *E-jurnal* 3(1): 12-31.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan daerah*.

- Peraturan Walikota Surabaya No. 33 tahun 2014 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Surabaya*.
- Soleh, C. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung*. Fokus Media. Bandung.
- Sudiarianti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi SDM pada Pemerintah serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Universitas Undayana. Denpasar.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Yulia, S. 2017. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* 2(3): 1-29.